

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orde Baru telah mengalami keruntuhan seiring jatuhnya Soeharto sebagai presiden yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun, setelah sebelumnya krisis ekonomi menghancurkan legitimasi pemerintahan Orde Baru (Budi Winarno, 2008: vii). Meskipun demikian, pada kenyataannya krisis tidak hanya mempunyai dimensi buruk. Sebaliknya, krisis juga memberikan peluang ke arah kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana dikemukakan oleh McBeth dalam Budi Winarno (2008: viii-ix), bahwa tanpa adanya krisis ekonomi tidak akan pernah ada perubahan politik. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang terjadi di Indonesia bahwa krisis ekonomi telah menjadi penyulut tidak hanya kejatuhan Soeharto, tetapi juga reformasi politik. Reformasi ini beberapa diantaranya telah menggeser struktur politik Orde Baru yang otoriter dan digantikan dengan struktur politik yang lebih demokratis. Pemilu yang pada masa Orde Baru hanya menjadi ‘ritual’ demokrasi tanpa makna, kini telah menjadi bagian penting demokrasi.

Reformasi yang terjadi di Indonesia memberikan pengaruh untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu hal yang dapat dilihat secara nyata pasca reformasi adalah dilakukannya perubahan tata cara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada), baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Perubahan tersebut terasa sangat drastis jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan sebelumnya.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung tersebut telah melahirkan demokrasi di tingkat lokal. Dalam hal ini, rakyat dapat memilih langsung wakil-wakilnya untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah yang akan merepresentasikan kepentingan mereka. Seperti kenyataan yang dapat kita lihat, bahwa dewasa ini masyarakat Indonesia telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk ikut berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di negaranya. Salah satunya dapat dilihat dari adanya keikutsertaan seorang warga negara dalam menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka, maupun keikutsertaannya dalam menentukan isi suatu kebijakan yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini partai politik tentunya memiliki peranan yang penting, yaitu sebagai perantara bagi kepentingan rakyat dengan pemerintah. Partai politik hendaknya mampu menyampaikan dengan baik aspirasi rakyat yang ditujukan kepada pemerintah dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ramlan Surbakti (2007: 116):

Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Dalam sistem politik demokrasi, partai politik mempunyai fungsi sebagai pemadu berbagai kepentingan, kemudian partai politik tersebut memperjuangkannya melalui proses politik dengan terlebih dahulu berupaya mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum. Partai politik di negara demokrasi juga melakukan fungsi sosialisasi dan pendidikan politik,

tetapi bukan dengan indoktrinasi sebagaimana yang dilakukan oleh partai politik di negara totaliter (Ramlan Surbakti, 2007: 115-116). Partai politik mempunyai fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum (Ramlan Surbakti, 2007: 116-117). Menurut J. Kristiadi sebagaimana dikutip oleh Hafied Cangara (2011: 215) partai politik yang seharusnya dapat dijadikan instrumen untuk menilai calon yang paling baik bagi masyarakat, cenderung lebih mementingkan calon-calon yang loyal kepada atasan daripada calon di luar partai politik yang memungkinkan dianggap masyarakat lebih berkualitas dan pantas menjadi kepala daerah. Apabila orang-orang yang menguasai lembaga tersebut tidak pernah peduli kepada pemegang sejati kedaulatan rakyat, yaitu rakyat itu sendiri, maka partai politik yang pada dasarnya sebagian besar feodalistik dan pragmatis akan semakin kehilangan roh dan relevansinya bagi perkembangan demokrasi.

Apabila melihat kenyataan seperti saat ini, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak akan terlepas dari adanya suatu konflik. Jika dicermati kerawanan yang bisa memicu sumber konflik dalam pemilihan kepala daerah, apakah itu di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota, menurut Hafied Cangara (2011: 213-214) dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. dampak pemekaran daerah, sehingga menjadi ajang perebutan kekuasaan di kalangan elite politik lokal;
2. ketidakseimbangan populasi antara penduduk asli dengan para pendatang yang relatif besar jumlahnya;

3. isu *money politics* disebabkan tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang relatif rendah;
4. fanatisme golongan dan keluarga sangat menonjol, sehingga kadang tidak rasional dan menimbulkan sikap siap menang, tetapi tidak siap kalah;
5. sikap para saksi dan wakil partai yang mengusung calon tidak mau menandatangani berita acara perhitungan suara;
6. kekurangpahaman terhadap metode riset ilmiah melalui *quick count*, sehingga cenderung menolak hasil perhitungan dengan melakukan perhitungan sendiri yang kurang didasari keakuratan data;
7. administrasi kependudukan yang tidak tertib sehingga menimbulkan banyak protes atas “surat panggilan pilkada” yang mereka tidak terima, atau ada, tetapi dicoblos oleh orang lain.

Hafied Cangara (2011: 215-216) menyatakan bahwa demokrasi sangat mahal biayanya, karena sesungguhnya membangun demokrasi sama dengan membangun peradaban. Demokrasi bukan hanya sebuah peristiwa pemilihan yang dilakukan oleh mereka yang berhak memilih, tetapi lebih luas dari itu. Demokrasi memang sudah seharusnya diikuti oleh kedewasaan berpolitik, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, serta dilaksanakan secara bebas, jujur dan terbuka. Oleh karena itu, penggunaan cara-cara kekerasan untuk memaksakan kehendak merupakan tindakan yang melanggar prinsip demokrasi, sekalipun itu dilakukan demi demokrasi. Pada dasarnya demokrasi hanya mungkin dibangun dengan cara-cara yang beradab, agar fondasinya menjadi kuat dan tahan dari segala goncangan.

Demokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini tidak diragukan lagi karena nilai-nilai yang dikandung oleh demokrasi sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan kata lain, demokrasi dipandang penting karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau masyarakat dan pemerintahan yang baik (*good society and good government*) (Cholisin dan Nasiwan, 2012: 88). Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi sudah

semestinya menyediakan ruang bagi partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum agar mampu menjalankan berbagai macam fungsinya dengan baik.

Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2010. Pemilukada ini diikuti oleh empat pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam pengundian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gunungkidul, pasangan H. Suharto, SH–H. Arief Gunadi, M.PdI yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat nomor urut satu. Pasangan H. Sutrisno, SE–Slamet, S.Pd, MM yang diusung Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) mendapat nomor urut dua. Pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat nomor urut tiga. Sedangkan pasangan H. Yanto, SH–Ngadiyono yang diusung Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Barisan Nasional (Partai Barnas), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) mendapat nomor urut empat (Sumber: KPUD Kabupaten Gunungkidul 2010).

Berbeda dengan Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2005, pada pemilukada tahun 2010 H. Suharto, SH., (bupati *incumbent*) tidak diusung oleh

PAN. Sedangkan Hj. Badingah, S.Sos., menjadi calon wakil kepala daerah berpasangan dengan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc., yang diusung oleh PAN. Pasangan H. Suharto, SH–Hj. Badingah, S.Sos pada Pemilu Kabupatan Gunungkidul tahun 2005 mampu mengungguli pasangan lain dengan memperoleh 126.514 suara.

H. Suharto, SH., sebagai bupati *incumbent* dan calon kepala daerah yang diusung PDIP dan PKB tidak mampu memenangkan kompetisi politik pada Pemilu Kabupatan Gunungkidul tahun 2010, walaupun pada dasarnya ia diusung oleh partai terbesar di Kabupatan Gunungkidul. PDIP dapat dikatakan sebagai partai terbesar di Kabupatan Gunungkidul karena mampu memperoleh suara terbanyak pada pemilu legislatif tahun 2009, yaitu sebesar 84.845 suara atau 21,50%. Dengan perolehan suara tersebut, PDIP mampu memperoleh 11 kursi dari 45 kursi yang tersedia di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupatan Gunungkidul atau memperoleh jatah kursi sebesar 24,44%. Kemudian PKB yang juga mengusung H. Suharto, SH., bersama PDIP mampu mendapatkan suara yang cukup besar pada pemilu legislatif tahun 2009, yaitu sebesar 18.982 suara atau 4,81%. PKB mampu memperoleh 3 kursi di DPRD Kabupatan Gunungkidul atau memperoleh jatah kursi sebesar 6,66% (Sumber: KPUD Kabupatan Gunungkidul 2010). Hal ini dapat menjadi modal dasar yang kuat bagi pasangan H. Suharto, SH–H. Arief Gunadi, M.PdI bersama PDIP dan PKB agar bisa memenangkan Pemilu Kabupatan Gunungkidul tahun 2010.

Meskipun pasangan H. Suharto, SH–H. Arief Gunadi, M.PdI bersama PDIP dan PKB telah memiliki modal dasar yang kuat untuk memenangkan Pemilu Kabupatan

Kabupaten Gunungkidul tahun 2010, kenyataannya pada pemilukada tersebut hanya mampu menduduki urutan kedua. Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 justru dimenangkan oleh pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos., yang diusung oleh PAN dan didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam hal perolehan suara PAN pada pemilu legislatif tahun 2009, PAN hanya mampu berada di urutan kedua setelah PDIP. Pada pemilu legislatif tahun 2009, PAN memperoleh 65.937 suara atau 16,71% dan hanya mampu mendapatkan 9 kursi di DPRD Kabupaten Gunungkidul atau memperoleh jatah kursi sebesar 20,0%. Sedangkan PKS sebagai partai pendukung pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos., hanya mampu memperoleh 21.293 suara atau 5,39% pada pemilu legislatif tahun 2009, dan 4 kursi di DPRD Kabupaten Gunungkidul atau memperoleh jatah kursi sebesar 8,88% (Sumber: KPUD Kabupaten Gunungkidul 2010).

Data hasil Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 dari KPUD Kabupaten Gunungkidul menyebutkan bahwa pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc dan Hj. Badingah, S.Sos mampu memenangkan Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 dengan perolehan suara sebesar 36,03% (146.849 suara). Disusul pasangan H. Suharto, SH dan H. Arief Gunadi, M.PdI dengan perolehan suara sebesar 31,86% (129.841 suara). Kemudian pasangan H. Sutrisno, SE dan Slamet, S.Pd, MM memperoleh suara sebesar 29,39% (119.778 suara), dan terakhir pasangan H. Yanto, SH dan Ngadiyono memperoleh suara sebesar 2,72% (11.103 suara) (Sumber: KPUD Kabupaten Gunungkidul 2010).

Pemilukada tersebut mampu dimenangkan pasangan nomor urut tiga dalam satu kali putaran.

PAN sebagai partai yang mampu memenangkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 nampaknya memiliki strategi tertentu untuk menjaring suara masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Seperti yang telah diketahui bahwa pada dasarnya di Kabupaten Gunungkidul sendiri PDIP-lah yang memiliki basis massa lebih besar jika dibandingkan PAN. Apalagi mengingat letak geografis Kabupaten Gunungkidul yang bergunung-gunung dan kondisi sosial ekonomi yang melingkupi daerah ini membuat masyarakat Gunungkidul mengalami keterbatasan sentuhan media. Sehingga dalam hal ini PAN harus mampu menyusun strategi-strategi tertentu agar dukungan masyarakat Gunungkidul pada Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 mengarah pada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PAN. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh partai politik untuk memenangkan calon dari partai politiknya yaitu dengan menggunakan komunikasi politik.

Menurut Ramlan Surbakti (2007: 119) komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Partai politik merupakan salah satu komponen demokrasi yang memiliki peranan besar dalam melaksanakan komunikasi politik. Secara lebih spesifik, komunikasi politik akan terlihat gencar pada masa-masa pra-pemilukada. Hal ini terutama karena bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari tokoh dan warga masyarakat pada hari pemilihan,

agar mereka mau memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal komunikasi politik ini, tentunya siapa tokoh yang akan melakukan komunikasi kepada khalayak juga menjadi sangat penting selain pesan politik yang disampaikan.

Keberhasilan komunikasi politik yang dilakukan oleh suatu partai politik tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mampu mendukung berhasilnya proses komunikasi politik tersebut. Faktor yang mampu mendukung keberhasilan komunikasi politik tersebut antara lain adanya dukungan kuat dari partai politik yang mengusung calon pemimpin tersebut, calon pemimpin tersebut memiliki jaringan yang luas serta *track record* yang baik, calon pemimpin memiliki kedekatan secara politik maupun kultural dengan masyarakatnya, dan faktor lain yang sebenarnya tidak murni terjadi karena adanya pendekatan politik saja. Dari sekian banyak faktor yang telah dipaparkan tersebut, salah satu faktor yang mampu menjadi pendukung keberhasilan komunikasi politik adalah adanya jaringan yang dimiliki oleh partai maupun calon pemimpin tersebut. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa PAN memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah, apalagi calon wakil kepala daerah dari PAN pernah pernah menjadi penasehat ‘Aisyiyah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang “Strategi Komunikasi Politik Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti, diantaranya adalah:

1. Partai politik yang seharusnya dapat dijadikan instrumen untuk menilai calon yang paling baik bagi masyarakat, cenderung lebih mementingkan calon-calon yang loyal kepada atasan daripada calon di luar partai politik yang memungkinkan dianggap masyarakat lebih berkualitas dan pantas menjadi kepala daerah.
2. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak akan terlepas dari adanya suatu konflik.
3. PAN mampu memenangkan Pemilu Kabupaten Gunungkidul tahun 2010, meskipun pada dasarnya PDIP memiliki basis massa yang lebih besar jika dibandingkan dengan PAN.
4. Kemenangan yang diraih PAN pada Pemilu Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 tidak hanya mengandalkan basis massa yang dimilikinya, akan tetapi ada strategi komunikasi politik yang dipakai oleh PAN untuk mempengaruhi suara masyarakat Gunungkidul pada pemilu tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis hanya akan membatasi penelitian ini pada masalah kemenangan yang diraih PAN pada Pemilu Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 tidak hanya mengandalkan basis massa yang dimilikinya, akan tetapi ada strategi komunikasi politik yang

dipakai oleh PAN untuk mempengaruhi suara masyarakat Gunungkidul pada pemilukada tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi politik Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenangkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi politik calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilihan umum Kabupaten Gunungkidul tahun 2010?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan strategi komunikasi politik Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenangkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi politik calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari

Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilihan umum Kabupaten Gunungkidul tahun 2010.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoretis yaitu menambah wawasan di bidang politik untuk mengetahui strategi komunikasi politik oleh suatu partai politik dalam upaya memenangkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah bagi mahasiswa program studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Partai Politik

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi partai politik mengenai pentingnya penggunaan strategi komunikasi politik dalam upaya memenangkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara *fair*.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pemerintah untuk lebih bersikap aktif dalam merespon berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat tentang strategi komunikasi politik oleh suatu partai politik dalam upaya memenangkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga masyarakat mampu berfikir secara kritis untuk memilih partai politik yang bersaing secara *fair* agar tercapai pemilihan umum yang bebas dari berbagai macam kecurangan.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah serta merupakan bentuk penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang politik yang telah diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan pada program studi PKn.

G. Batasan Istilah

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah tentang maksud dari judul penelitian secara etimologis dan terminologis sehingga terhindar dari kesalahpahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti memberikan paparan tentang definisi operasional sebagai berikut:

1. Strategi

Pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rencana yang cermat

mengenai komunikasi politik yang digunakan PAN untuk memenangkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010.

2. Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Ramlan Surbakti, 2010: 152). Komunikasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dalam memenangkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 yang dilakukan oleh PAN.

3. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengertian pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul secara langsung berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari batasan istilah tersebut, yang dimaksud penelitian ini adalah serangkaian perilaku untuk merencanakan secara cermat tentang proses penyampaian informasi mengenai politik yang digunakan PAN dalam upaya memenangkan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 2010. Dalam hal ini, pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan cara memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul secara langsung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.